

PENGARUH PERBANKAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

Priyo Utom, S.Sos, M.Si.
LPPM STIE PEMUDA SURABAYA
Jl. Bung Tumo No. 08 Kauling 8,9,10 Ngagel, Wonokromo - Surabaya

ABSTRAK

Sektor perbankan bagi suatu negara memiliki pengaruh yang sangat penting, terutama dalam pengaruhnya sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Pengaruh sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Salah satu misi dari Bank dalam melakukan kegiatan perbankan adalah memberikan kredit kepada nasabahnya (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan diketahui rata-rata 49,41persen pengeluaran penduduk di Kabupaten Lamongan digunakan untuk konsumsikomoditibukanmakanan. Kondisi ini dapat menjadi indikasi level tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan lebih baik. Upaya perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa PD. BPR Bank Daerah Lamongan sudah menjalankan beberapa program yang berkaitan dengan perbankan dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu memberikan peminjaman modal kepada para pengusaha UMKM di desa melalui Bank Desa, membuka unit-unit bank di daerah pedesaan (Kantor Kas PD.BPR Bank Daerah Lamongan) dengan program simpan pinjam bunga ringan, memberikan program kerjasama edukasi dan inovasi antara perbankan dan pemerintah untuk masyarakat pedesaan, memberikan perhatian ekstra kepada sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi desa, dan memberikan jasa pengelolaan keuangan bagi masyarakat desa dengan sistem yang lebih rapi dan modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam kaitannya dengan pengaruh perbankan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di kabupaten lamongan, maka disampaikan beberapa rekomendasi yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, maka alternatif kelembagaan badan usaha milik desa perlu dikaji kelayakannya untuk pengembangan di wilayah sentra produksi/usaha unggulan pada desa-desa yang potensial. Sehingga peran perbankan dalam memacu perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan akan langsung dapat dirasakan sampai ke tingkat desa, pemerintah daerah kabupaten lamongan dan pihak perbankan dapat mengembangkan wirausaha yang bergerak pada produk unggulan, melalui tahapan rekmitment/seleksi, pendidikan/pelatihan tambahan (pada aspek wirausaha dan keterampilan teknis serta usaha) serta penyediaan fasilitas kredit permodalan/pembiayaan dengan skim dana bergulir/dana revolving, peningkatan akses pembiayaan UMKM.

Kata Kunci :Perbankan, Kesejahteraan, MasyarakatPedesaan, UMKM

THE EFFECT OF BANKING ON INCREASING RURAL COMMUNITY WELFARE

SUMMARY

The banking sector for a country has a very important influence, especially in its influence as a lifeline for the national economy. The influence of the banking sector in development can also be seen in its function as a means of transmitting monetary policy. One of the missions of the Bank in conducting banking activities is to provide credit to its customers (UMKM) to support the improvement of the community's economy. Overall, it is known that on average 49.41 percent of the population expenditure in Lamongan Regency is used for consumption of non-food commodities. This condition can be an indication of the level of welfare of the people in Lamongan Regency better. Banking efforts in improving the welfare of rural communities have been implemented well, it can be seen that PD. BPR Lamongan Regional Bank has run several programs related to banking and government in improving the welfare of the village community is to provide capital loans to UMKM entrepreneurs in the village through the Village Bank, opening bank units in rural areas (Cash Office PD.BPR Bank Daerah Lamongan) with a small interest savings and loan program, providing collaborative education and innovation programs between banks and the government for rural communities, giving extra attention to the agricultural sector in rural economic growth, and providing financial management services to rural communities with a neater and more modern system.

This study uses qualitative methods, by collecting data through observation, documentation and interviews. In relation to the influence of banks on improving the welfare of rural communities in the district of Lamongan, a number of recommendations were given, namely to Improve Rural Community Economies, so Institutional Village-Owned Enterprises Need to be Assessed for Development in Leading Production / Business Centers in Potential Villages . So that the Role of Banks in Spurring the Economy and Increasing the Welfare of Rural Communities Will Be Directly Perceived Up to the Village Level, the Local Government of Lamongan Regency and Banks Can Develop Entrepreneurs Engaging in Superior Products, through stages of recruitment / selection, additional education / training (on entrepreneurial aspects and technical and business skills) and the provision of capital / financing credit facilities with a revolving fund / revolving fund scheme, Increased access to UMKM financing.

Keywords: Banking, Welfare, Rural Communities, UMKM

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pengaruh strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan sangat berpengaruh sebagai pelantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.

Membangun sistem perbankan yang sehat dan tangguh merupakan prasyarat penting bagi suatu negara dalam mendukung upaya pembangunan nasional secara berkesinambungan. Kondisi yang demikian disebabkan karena industri perbankan memiliki pengaruh yang sangat strategis dalam perekonomian, mengingat pengaruhnya sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Dengan pengaruh yang demikian strategis ini, eksistensi perbankan dalam suatu negara tidak dapat dipungkiri ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pada perkembangan sistem ekonomi modern, perbankan dapat dikatakan sebagai jantung yang mengalirkan darah berupa modal ke semua urat nadi perekonomian, baik kepada usaha berskala kecil, menengah, maupun besar. Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai agent of development dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pengaruh penting dan strategis itu terlihat dalam Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan industri perbankan di Indonesia tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional. Dalam pemaknaan lain, pembangunan industri perbankan di Indonesia ditujukan pada sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Makna kesejahteraan rakyat ini menjadi

bintang pemandu bagi tumbuh kembangnya industri perbankan dalam kerangka pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Perbankan ditentukan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank sangat bergantung kepada kesediaan masyarakat dalam menempatkan dananya di bank. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat menimbulkan masalah yang serius, tidak hanya pada perbankan itu sendiri, namun juga terhadap perekonomian secara luas. Dapat dibayangkan jika perbankan sebagai suatu sistem mengalami krisis kepercayaan sehingga hampir dapat dipastikan akan berpengaruh luas ke berbagai sektor perekonomian lainnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi secara nasional.

Sejarah telah membuktikan bahwa pada masa krisis ekonomi tahun 1997, sektor perbankan di Indonesia merupakan salah satu industri yang mengalami dampak paling parah dan relatif termahal di dunia. Banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan mengalami kemunduran kinerja, bahkan banyak yang dilikuidasi karena krisis kepercayaan masyarakat. Sistem perbankan benar-benar mengalami komplikasi dan berada di ambang kehancuran. Salah satu contoh kondisi yang sama terjadi kembali tahun 2008 akibat putaran krisis ekonomi dan keuangan global pasca kehancuran Lehman Brothers, di Amerika Serikat menimbulkan kekacauan dan kepanikan di pasar keuangan global, termasuk melibatkan perbankan di Indonesia.

Jika ditelusuri lebih jauh dalam momentum krisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ternyata lemahnya pengelolaan sistem perbankan menjadi faktor pemicu utama. Menurut Faisal Basri, awal kehancuran sistem perbankan di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Pertama, terlalu longgarnya aturan perbankan terutama sejak digulirkannya Paket Oktober 1988 (Pakto' 88). Kedua, bank dan sektor riil kian terintegrasi di dalam jalinan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang yang sama. Dalam Pakto' 88, perbankan nasional mempromosikan konsep “liberalisasi”. Lompatan liberalisasi yang tidak disikapi dan dirancang dengan baik berdampak tumbuhnya perbankan secara menjamur tanpa kesiapan dalam mengelola risiko bank secara benar.

Berbagai kenyataan di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa industri perbankan sebagai elan vital bagi suatu negara dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan rakyat, masih menghadapi persoalan serius dan mendesak untuk ditata kembali. Fungsi perbankan tidak akan berjalan secara efektif jika tidak didukung oleh suatu sistem perbankan yang sehat dan tangguh. Sistem perbankan yang sehat dan tangguh diyakini sebagai kata kunci menuju terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Karena itu, untuk keluar dari ketidakberesan industri perbankan ini, sesegera mungkin melakukan penguatan kajian perbankan melalui langkah strategis menuju perwujudan kesejahteraan masyarakat terlebih untuk masyarakat pedesaan.

Keberadaan bank memberikan manfaat bagi setiap orang yang ingin membuka usaha dengan memberikan pinjaman modal dalam membuka usaha. Sehingga hal tersebut dapat membantu pengusaha kecil dan menengah. Disamping itu, bank juga memiliki pengaruh penting dalam upaya pembangunan daerah. Karena keberadaan bank tersebut dapat memberikan bantuan berupa dana yang berguna untuk memperlancar pembangunan daerah. Akan tetapi, masih banyak masyarakat desa yang takut berhubungan dengan perbankan khususnya dalam hal menabung dan meminjam uang, karena prosesnya yang menurut mereka rumit dan lama. Sehingga mereka enggan untuk datang dan berhubungan langsung dengan bank.

Terdapat berbagai permasalahan di desa dalam hal perekonomian, salah satunya adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin kompleks. Sehingga banyak masyarakat desa yang melakukan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak. Padahal belum tentu terdapat pekerjaan yang layak di kota dan bahkan tidak sedikit masyarakat desa yang pada awalnya ingin mendapat pekerjaan yang layak di kota, justru mereka menjadi gelandangan, perampok, atau melakukan hal-hal yang kurang baik demi mencukupi kebutuhan karena gagal memperoleh pekerjaan. Bukan hanya itu, banyak siswa-siswi di wilayah pedesaan yang tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada bekerja di desa. Perbankan

harus lebih memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan. Dengan demikian pelayanan dari perbankan menjadikan tatanan ekonomi di desa lebih sejahtera. Sekaligus tujuan perbankan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pengaruh Perbankan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.
2. Mengetahui Upaya Perbankan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Nasabah UMKM

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah sebagai penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah sebagai debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam Penelitian ini nasabah bank adalah UMKM, karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu: UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

2. Sejarah PD BPR Bank Daerah Lamongan

Berawal dari keinginan untuk membantu masyarakat dalam permodalan maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berlokasi di sekitar daerah perbelanjaan dekat alun-alun Kota Lamongan, tepatnya di JL. KH. Hasyim Asyari Nomor 27 Lamongan. Lembaga tersebut tepatnya berdiri sejak tanggal 3 Desember 1952 dan diberi nama Bank Pasar.

Gagasan untuk mendirikan sebuah bank bermula adanya rasa keprihatinan terhadap rakyat kecil yang kesehariannya untuk permodalan ataupun mencukupi kebutuhan hidup terlilit dengan praktek usaha rentenir, baik di wilayah perkampungan, pasar ataupun kota dan semua orang membutuhkan uang untuk menambah permodalan. Peluang tersebut selalu dimanfaatkan oleh rentenir untuk mendapatkan keuntungan.

Kondisi yang demikian membuka hati para pejabat Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengupayakan cara dalam menjembatani kesulitan antara masyarakat yang membutuhkan uang dengan masyarakat yang kelebihan uang. Saat itulah Bank Pasar mulai memainkan pengaruhnya sebagai lembaga mediator untuk mengatasi kesulitan dalam permodalan ataupun dalam investasi bagi yang kelebihan uang. Di sisi lain belum terpikirkan oleh

Bank Pasar bagaimana strategi pemasaran ataupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang relevan dengan kebutuhan pasar semua masih berjalan secara natural serta rasa percaya diri yang terjalin kuat antara nasabah dan karyawan sebagai petugas Bank Pasar Kabupaten Lamongan.

Dengan kucuran modal yang minimum dari APBD senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Bank Pasar mulai beroperasi dengan memberikan pinjaman sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sampai dengan batas maksimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah). Mencari dan menunggu nasabah adalah kegiatan rutinitas karyawan dalam memberikan pelayanan dengan rasa cemas dan penuh harap karyawan berharap masyarakat dapat memanfaatkan jasa perbankan yang ditawarkan sebagai langkah untuk mencukupi kebutuhan dan menekan operasional rentenir liar.

Dalam mendukung usaha perbankan Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai memberikan dukungan dengan langkah – langkah yang sejalan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 7 Tahun 1978 maka Bank Pasar berstatus penuh menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan izin dari Menteri Keuangan dengan SKMU Nomor KET.- 361/ MK.11/1985.

Pada saat situasi perbankan di Indonesia mulai membaik awal juni 1983 yang dikenal dengan Pakjun – 83 Pakto – 88, Pakdes – 88, PakMar – 89, Pakjan – 90, Pakri – 91 yaitu pada saat dikeluarkannya deregulasi perbankan, namun Bank Pasar Lamongan belum mampu bangkit. Seiring perkembangan industri perbankan di Indonesia maka status Bank Pasar Lamongan mengalami peningkatan status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menurut Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang pokok – pokok perbankan, Bank yang berstatus BPR terbatas hanya menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk Giro serta ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan manajemen Perbankan maka berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Lamongan Nomor : 48 Tahun 2003 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan maka bagian – bagian yang mempunyai fungsi produksi dan umum difungsikan sebagaimana mestinya sebagai langkah

terhadap pemberdayaan SDM.

Untuk memantapkan status Bank Pasar sebagai asset Daerah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Bank Pasar pada tanggal 16 Januari 2007 berganti nama menjadi “Bank Daerah Lamongan” dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2007 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan. Melalui sentuhan naluri Bisnis Dewan Direksi Bank Daerah Lamongan menaruh harapan besar pada kondisi yang lebih baik dari kemarin baik dalam efektifitas kerja maupun dalam efisiensi biaya dalam rangka optimalisasi laba.

3. Visi dan Misi PD BPR Bank Daerah Lamongan

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi dari PD. BPR Bank Daerah Lamongan yaitu “Menjadi Bank terdepan dan terpercaya dalam menggerakkan ekonomi di Lamongan”. Dan misinya adalah :

- Memberantas lintah darat
- Memberi pinjaman dalam bidang perdagangan dan pengusaha ekonomi lemah
- Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat luas
- Mendidik masyarakat untuk menabung
- Menambah pendapatan asli Daerah
- Sebagai agent of development

B. Hasil Data di Lapangan

1. Jumlah Penduduk Lamongan

Kondisi penduduk Kabupaten Lamongan merupakan kondisi yang sangat menguntungkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan khususnya kemampuan masyarakat dalam membuka usaha dengan mengajukan modal ke pihak perbankan. Namun, kondisi tersebut juga harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dalam hal penyediaan dana revolving

yang memadai karena angka ketergantungannya cukup tinggi dan hal ini dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Jumlah UMKM di Lamongan

Jumlah UMKM di Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2016

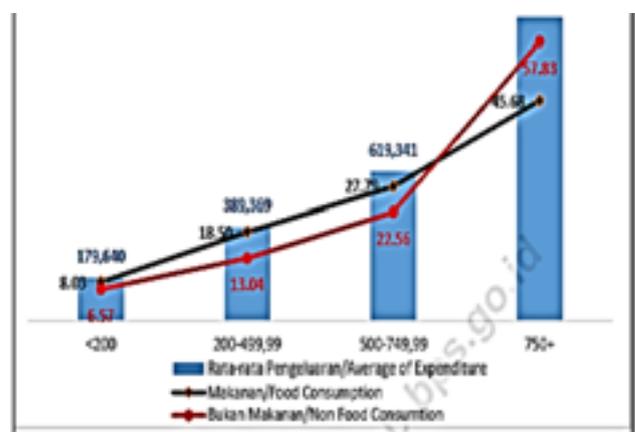
Indikator	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Usaha Kecil Menengan	13.252	13.871	14.414	14.999	15.595

UMKM di Kabupaten Lamongan meliputi semua usaha termasuk industri yang dijalankan masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Pengaruh Perbankan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan dengan pembentukan UMKM berjalan lancar.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini dapat diketahui di tahun 2017 secara otomatis juga mengalami perubahan yang lebih baik dan ini menunjukkan bahwa Pengaruh Perbankan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan yaitu UMKM sudah berhasil, yang mana dibuktikan dengan adanya penurunan penduduk miskin dikabupaten lamongan dan hal ini sesuai harapan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lamongan

Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kab. Lamongan Tahun 2012-2016



Berdasarkan Grafik 2, terlihat bahwa berdasarkan kelas pengeluaran, terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita dalam sebulan untuk setiap kelas pengeluaran. Hal ini dikarenakan semakin meningkat pendapatan seseorang, maka pola konsumsi atau pengeluaran akan bergeser dari dominan konsumsi pada komoditi makanan ke komoditi bukan makanan. Pada kelompok pengeluaran kurang dari 750 ribu, konsumsi makanan masih sangat dominan atau lebih dari 50 persen digunakan untuk konsumsi makanan. Namun pada kelompok 750 ribu rupiah atau lebih konsumsi bukan makanan mencapai 53,21 persen. Secara keseluruhan rata-rata 49,41 persen pengeluaran penduduk di Kabupaten Lamongan digunakan untuk konsumsi komoditi bukan makanan. Kondisi ini dapat menjadi indikasi level tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, lebih baik. Mengingat porsi terbesar pengeluarannya bukan untuk komoditi makanan lagi, ini adalah dampak pengaruh perbankan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan.

4. Rekapitulasi Kredit Berdasar Kolektabilitas Dan Jumlah Nasabah

Keberadaan industri perbankan di negara Indonesia secara faktual harus diakui telah memberikan pengaruh intermediasi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah kredit perbankan yang dikucurkan kepada masyarakat mengalami peningkatan signifikan. Dari rekapitulasi kredit berdasarkan kolektabilitas, diketahui pada tahun 2014 mencapai 13.586 nasabah, turun pada tahun 2015 mencapai 13.416 nasabah, kemudian meningkat menjadi 13.560 nasabah pada tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017 sebanyak 13.663 nasabah. Hal ini dikarenakan adanya Pengaruh Perbankan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, karena banyaknya kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat untuk peningkatan perekonomian.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Perbankan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.

Sektor perbankan bagi suatu negara memiliki pengaruh yang sangat penting, terutama dalam pengaruhnya sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Pengaruh sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Perbankan juga merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang penting untuk dilakukan.

Salah satu misi dari PD.BPR Bank Daerah Lamongan dalam melakukan kegiatan perbankan adalah memberi pinjaman dalam bidang perdagangan dan pengusaha ekonomi lemah, dan menjadi bank terdepan dan terpercaya dalam menggerakkan ekonomi di Lamongan. Pemberian pinjaman bank bertujuan untuk membantu usaha masyarakat agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberian pinjaman merupakan salah satu usaha bank yang sangat dirasakan pengaruhnya oleh pemerintah dalam menunjang pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak. Dan Secara keseluruhan persentase tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai data BPS Kabupate Lamongan Tahun 2016 diketahui 57,83 persen pengeluaran penduduk di Kabupaten Lamongan digunakan untuk konsumsi komoditi bukan makanan dan 45,68 persen untuk makanan dengan rata – rata pengeluaran mencapai 1.258.431. Kondisi ini dapat menjadi indikasi level tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, lebih baik.

Mengingat pentingnya pengaruh perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal yang patut dipertanyakan adalah apakah perbankan secara faktual telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi rakyat?

Hasil survei yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa perbankan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dilihat bahwa perbankan telah mendukung geliat ekonomi rakyat, baik dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan skala usaha besar. Dari tahun ke tahun jumlah kredit perbankan yang dikucurkan kepada masyarakat pedesaan mengalami peningkatan yang signifikan.

Komitmen perbankan dalam memberikan kredit kepada pelaku usaha dalam kurun waktu terakhir telah menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal demikian terlihat dari jumlah kredit yang dikucurkan kepada skala UMKM umumnya lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha besar, meskipun harus diakui perbedaan jumlah kredit yang dikucurkan tersebut dalam jumlah yang hampir sama besarnya.

Di satu sisi, usaha mikro dan kecil menjadi pilar perekonomian rakyat, lebih-lebih pada masa mengatasi dampak krisis ekonomi, tetapi di sisi lain usaha mikro dan kecil tidak cukup memperoleh layanan permodalan secara proporsional. Pelaku usaha mikro dan kecil mengharapkan terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat, dengan persyaratan yang mudah serta dengan biaya murah, tidak menjadi masalah lembaga keuangan apapun (formal atau informal) asal dapat memenuhi harapan tersebut. Akan tetapi, harapan ini tidak selalu terpenuhi dengan baik sehingga selalu muncul permasalahan pembiayaan, sedangkan perbankan mengharapkan dapat memberikan layanan keuangan sesuai persyaratan dan prosedur tertentu sebagai parameter baku yang harus dipenuhi, tetapi kembali pada sisi ini usaha mikro dan kecil tidak selalu dapat memenuhi ketentuan ini.

Akibatnya, usaha mikro dan kecil lebih mengandalkan pada non-banking financing guna mendanai usahanya. Hal ini terjadi karena akses usaha mikro dan kecil pada fasilitas perbankan sangat terbatas. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengaruh perbankan belum maksimal dalam upaya mendorong aktivitas perekonomian rakyat. Biasanya untuk mengatasi keterbatasan akses finansial ini, pemerintah melalui perbankan mengucurkan kebijakan paket kredit dengan pinjaman tertentu.

Berbagai hal yang telah diuraikan di atas jelas

menunjukkan bahwa perbankan masih terdapat persoalan sistemik. Bagaimana mungkin perbankan dalam menjalankan pengaruhnya secara efektif dan dinamis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat pedesaan, sementara persoalan yang mengitarinya tidak terselesaikan. Dalam kerangka pikir yang demikian, dibutuhkan upaya-upaya perbankan dalam perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pedesaan untuk lebih maksimal dan signifikan lagi.

B. Upaya Perbankan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Terdapat berbagai permasalahan di desa dalam hal perekonomian, salah satunya adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai di daerah pedesaan. Sehingga hal ini menyebabkan turunnya tingkat perekonomian masyarakat di desa. Lebih lagi banyak masyarakat desa yang belum memiliki pengertian yang cukup tentang masalah perbankan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan, banyak masyarakat desa yang melakukan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak. Padahal belum tentu terdapat pekerjaan yang layak di kota dan bahkan tidak sedikit masyarakat desa yang pada awalnya ingin mendapat pekerjaan yang layak di kota, justru mereka menjadi gelandangan, perampok, atau melakukan hal-hal yang kurang baik demi mencukupi kebutuhan karena gagal memperoleh pekerjaan.

Masalah ini tak bisa dibiarkan secara terus menerus. Diperlukan adanya suatu program yang pantas untuk menyelesaikan masalah perekonomian pedesaan, khususnya dari pihak perbankan. Karena perbankanlah yang mengurus masalah perekonomian nasional. Untuk itu perlu diadakannya suatu penyuluhan, pelatihan dan pembinaan yang cukup agar masyarakat dapat membangun perekonomian sendiri melalui pemberian pinjaman dengan bunga ringan dan persyaratan yang lebih mudah.

Menurut Perda Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan pasal 5 tujuan

didirikannya PD. BPR Bank Daerah Lamongan adalah pembangunan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenagakerjaan dalam perusahaan daerah menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ada beberapa upaya-upaya yang ditempuh oleh berbagai pihak termasuk perbankan dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya :

1. Peminjaman modal kepada para pengusaha UMKM di desa melalui Bank Desa.
2. Membuka unit-unit bank di daerah pedesaan(Kantor Kas PD.BPR Bank Daerah Lamongan) dengan program simpan pinjam bunga ringan.
3. Memberikan program kerjasama edukasi dan inovasi antara perbankan dan pemerintah untuk masyarakat pedesaan.
4. Memberikan perhatian ekstra kepada sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi desa.
5. Memberikan jasa pengelolaan keuangan bagi masyarakat desa dengan sistem yang lebih rapi dan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa sektor perbankan bagi suatu negara memiliki pengaruh yang sangat penting, terutama dalam pengaruhnya sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancaran aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Pengaruh sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Perbankan juga merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang penting untuk dilakukan. Salah satu misi dari Bank dalam melakukan kegiatan perbankan adalah memberikan kredit kepada nasabahnya (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Pemberian kredit bank bertujuan untuk membantu usaha masyarakat agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberian kredit merupakan

salah satu usaha bank yang sangat dirasakan pengaruhnya oleh pemerintah dalam menunjang pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak. Dan Secara keseluruhan persentase tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai data BPS Kabupate Lamongan Tahun 2016 diketahui 57,83 persen pengeluaran penduduk di Kabupaten Lamongan digunakan untuk konsumsi komoditi bukan makanan dan 45,68 persen untuk makanan dengan rata – rata pengeluaran mencapai 1.258.431. Kondisi ini dapat menjadi indikasi level tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, lebih baik.

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa upaya perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa PD.BPR Bank Daerah Lamongan sudah menjalankan beberapa program yang berkaitan dengan perbankan dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu memberikan peminjaman modal kepada para pengusaha UMKM di desa melalui Bank Desa, membuka unit-unit bank di daerah pedesaan (Kantor Kas PD.BPR Bank Daerah Lamongan) dengan program simpan pinjam bunga ringan, memberikan program kerjasama edukasi dan inovasi antara perbankan dan pemerintah untuk masyarakat pedesaan, memberikan perhatian ekstra kepada sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi desa, dan memberikan jasa pengelolaan keuangan bagi masyarakat desa dengan sistem yang lebih rapi dan modern.

REKOMENDASI

Dalam kaitannya dengan pengaruh perbankan terhadap m peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Lamongan, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan, Maka Aitematif Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Perlu Dikaji Kelayakannya Untuk Pengembangan Di Wilayah Sentra Produksi/ Usaha Unggulan Pada Desa-Desa Yang Potensial. Sehingga Peran Perbankan Dalam Memacu Perekonomian Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Akan Langsung Dapat Dirasakan Sampai Ke Tingkat Desa.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dan Pihak Perbankan Dapat Mengembangkan Wirausaha Yang Bergerak Pada produk Unggulan, melalui tahapan rekmitment / seleksi, pendidikan /pelatihan tambahan (pada aspek wirausaha dan keterampilan teknis serta usaha) serta penyediaan fasilitas kredit permodalan/pembiayaan dengan skim dana bergulir/dana revolving.
3. Peningkatan akses pembiayaan UMKM pada bisnis komoditi dan usaha unggulan perlu dilakukan dengan mengintensifkan penguatan dan perluasan jangkauan pelayanan, baik oleh perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.
4. Secara lebih spesifik lembaga perbankan perlu lebih intensif untuk meningkatkan akses pembiayaan untuk komoditi dan usaha unggulan

DAFTAR PUSTAKA

- Adler Haymens Manurung. (2003). *Memahami Seluk Beluk Investasi*. Jakarta : PT. Adler Manurung.
- Haeruman (1997). Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan. Bappenas <https://bdl.co.id/>
<http://eprints.perbanas.ac.id/1655/3/BAB%20I.pdf>
<http://firasi48.blogspot.co.id/2014/09/pengaruh-perbankan-dalam-peningkatan.html>
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pedesaan
<https://konsultankti.wordpress.com/2015/07/29/konsep-dasar-pembangunan-masyarakat-desa-dan-strategi-pembangunan-pedesaan-tinjauan-ringkas/>
<https://tiar73.wordpress.com/2016/12/18/pengaruh-perbankan-dalam-rangka-meningkatkan-kesejahteraan-rakyat-perspektif-teori-pembangunan-dalam-pemerintahan/>
- Keputusan Bupati Kepala Daerah Lamongan (2003). Nomor 48 Tahun 2003 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten lamongan
- Keputusan Menteri Keuangan dengan SKMU Nomor KET.- 361/ MK.11/1985. Bank Pasar berstatus penuh menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan (2007). Nomor 09 Tahun 2007 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2006). Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia (1992). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perbankan.
- Republik Indonesia (1998). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- Republik Indonesia (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Rimsky K. Judisseno. (2002). “Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Usman Sunyoto. (2004). “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.